

## PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANGERANG DALAM PENANGANAN SAMPAH (STUDI UPT WILAYAH TIMUR)

Okky Mirwandi<sup>1</sup>, Doddy Mulyono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Yuppentek Indonesia

Email: cokimirwandi0407@gmail.com, doddymulyono2020@gmail.com

### **Abstract**

*The increasing number of migrants from outside the region has resulted in an increase in the volume of waste in the city. Waste management is an effort to prevent the volume of waste from having a negative impact on the environment. The local government takes over official duties to play a role in realizing policies and providing services directly to the community, as the Tangerang City Environmental Service is responsible for carrying out waste management as a form of realization of the mandate of the Mayor of Tangerang Regulation Number 144 of 2021 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Office Work Procedures Tangerang City Environment. This study aims to describe the role of the Tangerang City Environmental Service regarding Waste Handling carried out in Tangerang City. Using qualitative research methods with descriptive analysis techniques. Data collection with documentation, namely collecting primary and secondary data through various sources. The results showed that the role of the Tangerang City Environmental Service was relatively high. From the two indicators to see the role of the agency, there are supporting factors, namely the formulation of policies in the form of rules marked by a work plan, clear vision and mission, SOP, and organizational structure. As for the inhibiting factors, namely the researchers saw a lack of facilities because the accumulation of waste on one land still depended on the Rawa Kucing TPA whose capacity was already overloaded, damage to supporting facilities, and socialization that was not comprehensive so that there were still people who did not sort waste from home. Therefore, the Tangerang City Environmental Service can increase active participation of the community in a sustainable manner in implementing the 3R movement by providing facilities and infrastructure for waste transportation and processing, waste alms movement, outreach/education on waste management, assistance/guidance of waste banks.*

**Keywords:** Garbage, Waste Management

### **Abstrak**

Meningkatnya jumlah pendatang dari luar daerah mengakibatkan bertambahnya volume sampah di kota. Penanganan sampah merupakan upaya agar volume sampah tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Pemerintah daerah mengambil alih tugas kedinasan berperan merealisasikan kebijakan dan memberi pelayanan secara langsung kemasyarakat, sebagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang bertanggungjawab melaksanakan penanganan sampah sebagai wujud realisasi amanah Peraturan Walikota Tangerang Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang tentang Penanganan Sampah yang dilakukan di Kota Tangerang. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data dengan dokumentasi, yakni mengumpulkan data primer dan sekunder melalui berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang relatif tinggi. Dari kedua indikator untuk melihat peran dinas tersebut terdapat faktor pendukung yaitu telah tersusunnya kebijakan berupa aturan ditandai dengan adanya rencana kerja, visi misi yang jelas, SOP, serta struktur organisasi. Adapun faktor penghambat yaitu peneliti melihat kurangnya sarana karena penumpukan sampah pada satu lahan masih bergantung pada TPA Rawa Kucing yang kapasitasnya sudah overload, kerusakan sarana pendukung, serta sosialisasi yang kurang menyeluruh sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak memilah sampah dari rumah. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat secara berkelanjutan dalam menerapkan gerakan 3R dengan memberikan sarana dan prasarana

pengangkutan dan pengolahan sampah, gerakan sedekah sampah, sosialisasi/edukasi pengolahan sampah, pendampingan/pembinaan bank sampah.

**Kata Kunci:** Sampah, Penanganan Sampah

## PENDAHULUAN

Penyapu jalan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pembangunan kota termasuk keindahan dan kebersihan kota, terutama di Kota Tangerang. Perkembangan kota yang begitu cepat, membawa dampak yang serius terhadap masalah lingkungan. Ketidakperdulian terhadap permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup, sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat.

Sampah merupakan sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan di buang ke lingkungan. Sampah akan bermanfaat untuk manusia dan lingkungan bila dikelola dengan baik, Akan tetapi sampah juga dapat berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan serta dapat menimbulkan bencana bila tidak dikelola dengan baik. Pertambahan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat telah menyebabkan produksi sampah pada perkotaan semakin tinggi. Hal ini bukan saja diakibatkan karena pertumbuhan penduduk tetapi juga karena meningkatnya timbulan sampah per kapita yang disebabkan oleh perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan. Jika sampah tersebut tidak ditangani dengan baik, akan dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan seperti gangguan kesehatan.

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dapat dikatakan kurang efektif. Pengelolaan sampah yang dilakukan masih berorientasi pada penyelesaian pembuangan sampah, hal ini dikarenakan belum adanya perencanaan sistem pengelolaan sampah yang profesional. Permasalahan sampah masih belum mendapatkan perhatian dalam hal kebijakan dibandingkan dengan permasalahan lain dalam perkembangan dan pembangunan kota. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum memahami pengelolaan sampah yang baik, padahal peran serta masyarakat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan sampah, sehingga jika dapat berjalan dengan apa yang diharapkan maka Bank Sampah akan menjadi suatu solusi nyata dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang.

Pengelolaan sampah Kota Tangerang meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Syarat yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. Sehingga jelas bahwa pentingnya dalam pengelolaan sampah, karena melihat perkembangan waktu yang senantiasa diiringi dengan penambahan penduduk yang berdampak terhadap jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat sementara lahan yang ada tetap.

Pemerintah mengklaim bahwa undang-undang ini hadir dengan mengusung konsep baru dalam manajemen sampah yakni kurangi-gunakan kembali-daur ulang atau dikenal dengan konsep 3R (Reduce-Reuse- Recycling). Konsep baru ini mengutamakan pendekatan pengurangan sampah. Karena itu, penanganan urusan sampah diatur mulai dari hulu sampai hilir atau dari sumber sampah hingga ke tempat pemrosesan dalam sampah. Dengan demikian, TPA singkatan dari Tempat Pembuangan Akhir diubah menjadi Tempat Pemrosesan Akhir.

Pengelolaan sampah konvensional sistem open dumping yang menumpukkan sampah di tempat terbuka pada TPA bukanlah merupakan pilihan yang ramah lingkungan karena membiarkan gas methane dan air lindi mencemari lingkungan sekitarnya. Apalagi penanganan yang terpusat (sentralisasi) pada TPA membuat jalur pengangkutan lebih panjang dan kurang efisien. Selain itu juga sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tidak memadai sehingga menyebabkan kurang optimal bekerjanya pengelola sampah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Berdasarkan hasil observasi penulis ditemukan beberapa fenomena berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan sampah di Kota Tangerang oleh Dinas Lingkungan Hidup
2. Indikasi kurangnya sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup khususnya
3. Indikasi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan menghubungkan bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam pengelolaan sampah. Maka dari itu penulis mengangkat suatu

judul penelitian yaitu “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam Penanganan Sampah (Studi UPT Wilayah Timur)”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Adapun dalam penelitian ini, Secara bahasa, istilah peran memiliki beragam arti, yaitu pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, aturan tingkah laku yang diharapkan dilakukan oleh orang yang berkedudukan dalam lingkungan masyarakat, atau ikut serta. Istilah peran juga diartikan sebagai tindakan seseorang dalam suatu peristiwa.

Maksud peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Khususnya UPT Wilayah Timur disini adalah keikutsertaan dan peranan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Khususnya UPT Wilayah Timur yang bertanggung jawab dalam mewujudkan visi misi kebersihan Kota Tangerang

Sedangkan Penanganan Sampah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penanganan berasal dari kata dasar tangan. Arti penanganan menyatakan adanya tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Dengan kata lain penanganan merupakan cara, proses, perbuatan dalam menangani sesuatu yang sedang terjadi.

Sedangkan sampah menurut undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada pasal 1 menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Maka sesuai dengan penjelasan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 bahwa penanganan sampah adalah penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Fiona dalam Tri Kharisma Jati menyebutkan bahwa peran pemerintah yakni pemenuhan infrastruktur lingkungan seperti air bersih, sanitasi, dan limbah padat (sampah) bagi masyarakat yang berpenghasilan dibawah rata-rata diselenggarakan oleh multi-stakeholder seperti pemerintah daerah, swasta, dan lembaga donor. Pemerintah daerah memiliki peran khusus tepatnya pada pengelolaan sampah, yaitu:

1. Pengatur Kebijakan (Regulator)

Peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan dijelaskan oleh Nishimoto dalam Tri Kharisma Jati, bahwa dalam proses pengelolaan sampah pemerintah daerah merujuk pada amanah yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah secara nasional. Penyelenggaraan tersebut diatur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan juga dapat dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan pihak lain. Dalam aturan kebijakan pengelolaan sampah tersebut maka perda haruslah tegas dalam menetapkan institusi formal pengelolaan kebersihan.

## 2. Penyedia Layanan (Service Provider)

Peran pemerintah sebagai penyedia layanan dalam pengelolaan sampah yaitu sebagai upaya memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan proses pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah, pemerintah juga melakukan andil dengan menunjukkan kesiapannya memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan juga turut dalam mengembangkan hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengelolaan dan pembuangan akhir. Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Secara sederhana tahapan-tahapan dan proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.

Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat berat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/ pengelolaan. Pada tahap ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat

pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir. Pada tahap pembuangan akhir atau pengelolaan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia, maupun biologis, sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

Perumusan masalah yang dibuat yaitu sebagai berikut: Bagaimana keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam Penanganan Sampah (Studi UPT Wilayah Timur)?.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2005:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun Bogdan dan Taylor (dalam moleong 2005:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Melalui metode penelitian deskriptif, metode ini berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Khususnya UPT Wilayah Timur dalam Penanganan Sampah Dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka penulis akan melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan informan dan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara.

informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, 1. bapak Armiga Budiawan, ST.,MT. Kepala UPT Pengelolaan Sampah Wilayah Timur, 2. Bapak Bachrudin, ST. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Sampah Wilayah Timur, 3. Bapak Wahyu (Mandor) Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 4. Bapak Suryadi, Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang 5. Ibu Khodijah warga Kota Tangerang. Dalam penelitian ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Kedudukannya adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## **2. Peran Pemerintah sebagai Pembuat Kebijakan (Regulator)**

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam Penanganan Sampah (Studi UPT Wilayah Timur) peneliti lihat berdasarkan teori yang menjelaskan dua indikator yang disebutkan oleh Fiona dalam Tri Kharisma Jati; yakni: pemerintah sebagai pembuat kebijakan (Regulator) dan sebagai (service provider).

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan yakni membuat aturan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan juga dapat dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan kinerja.

Terdapat Peraturan Walikota Tangerang Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Yang merupakan bentuk representasi kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketetapan pemerintah pusat. Selain itu juga terdapat Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan acuan dalam manajemen persampahan.

Tabel 1. Rumusan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam bidang  
Pengelolaan Sampah

No	Kegiatan
1	Menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
2	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
3	Kerjasama pengelolaan persampahan
4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6	Pembersihan sendimen dan sampah khusus
7	Peningkatan sarana dan prasarana TPA
8	Pendataan, pemetaan pengelolaan sampah dan taman/RTH
9	Pengembangan pengelolaan 3R
10	Peningkatan penerimaan retribusi sampah
11	Sosialisasi kebersihan dan penerapan hukum

#### 1) Kebijakan Pemilahan

Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 PRT/M Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 maka kebijakan awal yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam hal penanganan sampah ialah dengan kegiatan pemilahan. Masyarakat perlu melakukan kegiatan pewadahan dan pemilahan sampah dari sumbernya, pengelolaan sampah skala masyarakat, pengumpulan sampah dari sumber ke TPS.

#### 2) Kebijakan Pengumpulan

Kebijakan pengumpulan sampah yang tertulis pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M2013 tentang penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022. Dalam kegiatan pengumpulan sampah terdapat anggota yang bertugas untuk melakukan pengumpulan sampah serta sarana yang diberikan.

1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
  - a) TPS
  - b) TPS 3R, dan/atau

- c) Alat pengumpulan untuk sampah terpilah
- 2. Pemerintah kabupaten/kota menyediakan:
  - a) TPS dan/atau
  - b) TPS 3R pada wilayah permukiman
- 3) Kebijakan Pengangkutan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah melaksanakan pengangkutan sampah pada setiap harinya. Pengangkutan sampah tersebut dibagi menjadi tiga zona jam operasional. Zona jam pertama dilaksanakan mulai pukul 06.00 sampai pukul 10.00, zona kedua dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai 12.00 sedangkan zona ketiga dilaksanakan dari jam 20.00 sampai 24.00. Upaya tersebut diterapkan untuk menjaga kebersihan kota Tangerang.

Kota Tangerang juga telah menerapkan metode Pemilahan dalam melakukan pengangkutan sampah. Metode ini menggunakan prinsip pemilahan sampah dari sumbernya, penggunaan jadwal pengumpulan, pengawasan, pembinaan petugas kebersihan, dan terakhir dilakukan pengangkutan jenis-jenis sampah khusus.

#### 4) Kebijakan Pengolahan

Kegiatan sistem pengelolaan sampah dilakukan dengan program 3R oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dimana daerah pelayanan meliputi 13 kecamatan dengan 104 kelurahan yang ada di Kota Tangerang. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang juga melakukan koordinasi kecamatan dan kelurahan bidang kebersihan, keindahan dan ketertiban untuk wilayah kecamatan dan kelurahan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang mengelola sampah domestik dan sampah nondomestik pada jalan protokol dan pengangkutan sampah, dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah membuat 3 kegiatan dalam penanganan sampah, yaitu:

- a. Recycle / Daur ulang, adalah pemanfaatan limbah melalui pengolahan fisik atau kimia, untuk dapat menghasilkan produk lain.
- b. Reuse / Penggunaan kembali, adalah penggunaan kembali untuk keperluan yang sama tanpa dilakukan perubahan bentuk.

c. Reduce / Perolehan kembali, adalah upaya pemanfaatan limbah dengan cara diproses untuk mendapatkan kembali salah satu atau lebih materi / komponen yang terkandung di dalamnya.

### 5) Kebijakan Pemrosesan Akhir

Kebijakan pemrosesan akhir adalah tahapan terakhir dari proses pengolahan sampah. Berdasarkan hasil observasi metode yang digunakan dalam proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam proses pengolahan sampah ialah adanya pemisahan antara sampah yang dapat didaur ulang dengan sampah yang tidak dapat didaur ulang lagi.

### 3. Peran Pemerintah sebagai Penyedia Layanan

Pemerintah memiliki peran sebagai penyedia layanan dalam pengelolaan sampah yaitu sebagai bentuk upaya memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan (pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan) sampah. Selain itu pada pelaksanaannya, pemerintah juga memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Secara nasional, pencapaian tingkat pelayanan hanya sebesar  $\pm 100\%$ , berarti pencapaian tingkat pelayanan persampahan di Kota Tangerang telah mampu melampaui pencapaian tingkat pelayanan secara nasional. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang juga memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung dalam mencapai tujuan penanganan sampah.

Tabel 2. Penanganan Sampah Tahun 2020

A. Terolah Menjadi Bahan Baku								
No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Timbulan Sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah Terkelola (ton/hari)	Sampah Terkelola (ton/tahun)	Sisa Sampah (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
1	TPS 3R dikelola oleh sistem kota (Pemda) non maggot	5	1.623,02	592.403,40	5,34	1.955,17	590.448,22	0,330%
2	Intermediate Treatment Facility (ITF) dikelola oleh sistem kota (Pemda) non maggot	1	1.623,02	592.403,40	1,93	706,38	591.697,02	0,119%
<b>Total</b>		<b>6</b>	<b>1.623,02</b>	<b>592.403,40</b>	<b>7,27</b>	<b>2.661,55</b>	<b>589.741,85</b>	<b>0,449%</b>

B. Pemrosesan Akhir								
No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah Terkelola (ton/hari)	Sampah Terkelola (ton/tahun)	Sisa Sampah (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
<b>Masuk ke TPA</b>								
1	Sampah yang hanya di Landfill TPA (sanitary landfill / control landfill)	1	1.623,02	592.403,40	1.443,00	528.138,00	64.265,40	89,152%
2	Kompos di TPA	1	1.623,02	592.403,40	9,600	3.513,60	588.889,80	0,593%
<b>Total Pengelolaan di TPA</b>			<b>1.623,02</b>	<b>592.403,40</b>	<b>1.452,60</b>	<b>531.651,60</b>	<b>60.751,80</b>	<b>89,745%</b>
<b>Total Penanganan Sampah</b>								<b>90,194%</b>

Sumber: LKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

Berdasarkan data penanganan sampah tabel di atas tersebut, kontribusi Intermediate Treatment Facility (ITF) cukup besar dalam mengolah sampah dan mengurangi sampah yang masuk ke TPA yaitu sebesar 0,119 %. TPS 3R yang dikelola oleh Pemda pun juga memberikan kontribusi yang cukup besar, meskipun jumlahnya masih sedikit (9 TPS 3R), yaitu sebesar 0,330 %. Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya diperlukan pembangunan TPS 3R baru agar dapat meningkatkan persentase dalam pengolahan sampah. Dari segi pemrosesan akhir, 89,152 % sampah telah diproses di Landfill dan 0,593 % sampah organik diolah menjadi kompos di TPA. Target tahun 2022 diharapkan sebanyak 82,00 % dari total timbulan sampah tertangani dan terolah. Realisasi dari target tersebut, sebesar 90,194 % sampah telah tertangani dan terolah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang juga memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung dalam mencapai tujuan penanganan sampah.

Tabel 3 Daftar TPST Kota Tangerang

No	Nama TPST	Lokasi
1	TPS 3R Benua Hijau	Jl. Perum Benua Indah RT 01 RW 07 Kel. Pabuaran Tumpeng, Karawaci
2	PS 3R Poris Plawad Utara (Sapu Pengki)	Jl. Panglima Polim No. 1 Kel. Poris Plawad Utara, Cipondoh (Samping Kantor Kelurahan Poris Plawad Utara)
3	TPS 3R Cimone	Jl. Merdeka, Cimone Jaya, Karawaci (Terminal Cimone)
4	TPS 3R Nusa Jaya (Widatama)	Jl. Nusa Indah Jaya RW 07, Kel. Nusa Jaya, Karawaci
5	TPS 3R VTI	Jl. Gn. Papandayan 4, Villa Tangerang Indah RT 05 RW 10, Kel. Gebang Raya, Periuk
6	TPS 3R Karsa Mandiri	Jl. Sukapandi Kel. Karang Sari, Neglasari
7	TPS 3R Nerogtog	Kp. Nerogtog RT 01 RW 05 Kel. Nerogtog, Pinang
8	TPS 3R Dongkal	Jl. Galaxy 34 No. F1 N, RT 01 RW 10, Cipondoh Indah, Cipondoh
9	TPS Kenanga	Kelurahan Kenanga, Cipondoh
10	Intermediate Treatment Facility (ITF)	Jl. Pajajaran, Gandasari, Jatiuwung (Belakang GOR Gandasari)

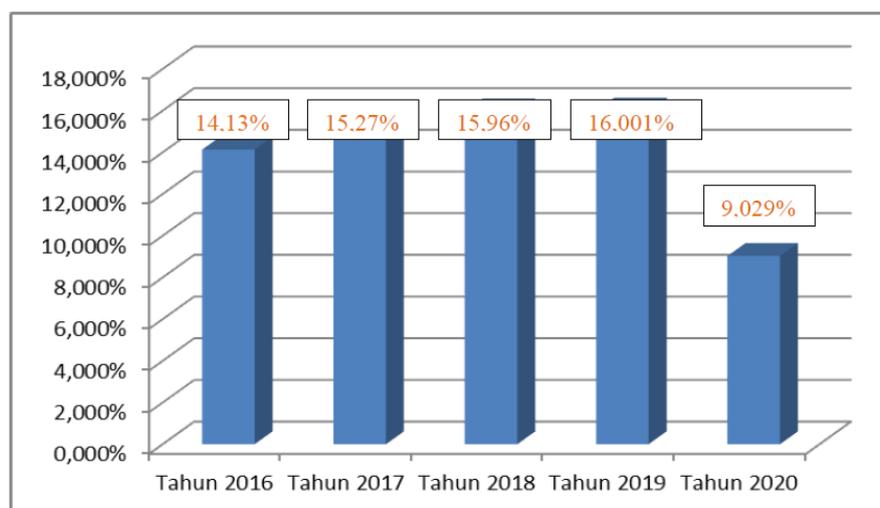
Masyarakat menyebutkan bahwa penanganan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang masih kurang dalam penyediaan sarana. Di dalam hal ini, tempat penampungan sampah menjadi sasaran utama yang menunjukkan kurangnya fasilitas pelayanan yang disediakan dalam penanganan sampah.

Tabel 4 Data Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang

A. Pembatasan Timbulan Sampah							
No.	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah yang Dibatasi (ton/hari)	Sampah yang Dibatasi (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
1	Sekolah Adiwiyata (orang)	255.178	1.623,02	592.403,40	25,52	2.322,12	0,392%
2	Sekolah Non Adiwiyata (orang)	31.128	1.623,02	592.403,40	3,11	283,26	0,048%
3	Pondok Pesantren (orang)	2.400	1.623,02	592.403,40	0,24	87,84	0,015%
4	Perkantoran (orang)	14.000	1.623,02	592.403,40	1,40	404,60	0,068%
5	Pasar (orang)	2.500	1.623,02	592.403,40	0,48	173,85	0,029%
6	Retail Modern (orang)	30.000	1.623,02	592.403,40	11,10	3.207,90	0,542%
7	Swalayan/Mini Market (orang)	24.380	1.623,02	592.403,40	9,02	3.301,54	0,557%
8	Penginapan/Hotel/Wisma (orang)	2.750	1.623,02	592.403,40	1,35	389,43	0,066%
9	Rumah Makan/Restoran (orang)	18.500	1.623,02	592.403,40	1,85	534,65	0,090%
10	Kegiatan Gerakan Sumber Bersih (HPSN, Jumat Bersih, Bersih-Bersih Pantai, Event Lainnya)	10	1.623,02	592.403,40	0,01	2,56	0,0004%
<b>Total</b>		<b>380.846</b>	<b>1.623,02</b>	<b>592.403,40</b>	<b>54,07</b>	<b>10.707,75</b>	<b>1,808%</b>
B. Jumlah Sampah Termanfaatkan							
No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah Terkelola (ton/hari)	Sampah Terkelola (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
1	Bank Sampah Unit dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	155	1.623,02	592.403,40	7,75	2.239,75	0,378%
2	Pengumpulan di Lapak dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	16	1.623,02	592.403,40	64,70	23.681,66	3,998%
3	Pemulung di Sumber (orang)	1040	1.623,02	592.403,40	15,60	5.709,60	0,964%
4	Pemulung TPA (orang)	1000	1.623,02	592.403,40	13,00	4.758,00	0,803%
<b>Total</b>			<b>1.623,02</b>	<b>592.403,40</b>	<b>101,05</b>	<b>36.389,01</b>	<b>6,143%</b>
C. Jumlah Sampah yang di Daur Ulang							
No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah Terkelola (ton/hari)	Sampah Terkelola (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
1	Komposting skala rumah tangga	1.432	1.623,02	592.403,40	2,864	1.048,22	0,177%
2	Sedekah Sampah	2	1.623,02	592.403,40	0,07	25,62	0,004%
3	Sedekah Ampas Kopi	35	1.623,02	592.403,40	0,035	12,81	0,002%
4	Biopori	5.380	1.623,02	592.403,40	10,76	3.938,16	0,665%
5	Pusat Olah Organik (Maggot ITF)	1	1.623,02	592.403,40	1,80	658,80	0,111%
6	Maggot TPS 3R	4	1.623,02	592.403,40	1,60	585,60	0,099%
7	Maggot Masyarakat	86	1.623,02	592.403,40	3,87	1.199,97	0,202%
<b>Total</b>			<b>1.623,02</b>	<b>592.403,40</b>	<b>21,00</b>	<b>6.389,18</b>	<b>1,079%</b>
<b>Total Pengurangan Sampah</b>							<b>9,029%</b>

perbandingan jumlah sampah yang dikelola oleh Kota Tangerang pada setiap tahunnya, seperti timbulan sampah, penanganan sampah, sampah yang dikelola, sampah masuk, dan sampah keluar.

Gambar 1. Pengurangan Sampah



### Sumber LKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

Tahun 2016 pengurangan sampah telah mencapai 14,13 % karena adanya kontribusi dari banyak bank sampah yang baru terbentuk dan adanya aktivitas pengolahan sampah di TPS 3R sebelum sampah dibawa ke TPA. Tahun 2019 aktivitas bank sampah dan TPS 3R semakin meningkat sehingga pengurangan sampah pun juga meningkat menjadi 15,27 % sesuai target yang telah ditetapkan. Tahun 2028 pengurangan sampah semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 15,96 % dan telah melebihi target yang telah ditetapkan saat itu. Kemudian pada tahun 2020 persentase pengurangan sampah sedikit meningkat menjadi 16,001 % dan sudah sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 16 %. Pada tahun 2020 pengurangan sampah dari aktivitas bank sampah dan lapak cukup besar memberikan kontribusi sehingga target dapat tercapai. Tetapi, pada tahun 2020 pengurangan sampah mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat adanya pandemic covid-19 sejak awal tahun 2021. Pandemi ini menyebabkan aktivitas bank sampah berhenti secara total dan lapak kesulitan untuk menjual sampah anorganiknya ke Perusahaan sehingga persentase pengurangan sampah pun menjadi sangat berkurang dibanding tahun sebelumnya.

### KESIMPULAN

Keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam penanganan sampah di Kota Tangerang telah ditunjukkan dengan adanya aturan yang berlaku seperti terdapatnya rencana kerja, rumusan kegiatan, visi misi yang jelas, serta struktur organisasi penanggung jawab setiap bagian. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang juga terlibat dalam pemilahan sampah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mempercayakan masyarakat untuk memilah sampah dari rumah. Pada pengolahan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang mengadakan kegiatan 3R. Sedangkan pada pemrosesan akhir sampah, dilakukan dengan mengandalkan membuang sampah ke TPA Rawa Kucing.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2008, Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi. Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Pt. Bumi Aksara.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Afifuddin. (2010). Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: CV Alfabeta.

- Agustino, Leo. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah. Malayu: Rineka Cipta.
- Chandra, Budiman. 2006. Pengantar Kesehatan Lingkungan. EGC. Jakarta
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Febriani, dkk. 2020. Analisis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Jurnal Photon Vol.11No.1, October 2020.
- Harbani, Pasolong. 2008. Kepemimpinan Birokrasi, Bandung : CV.Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi revisi cetakan ke tiga belas). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>
- Inu Kencana Syafie. 2003. Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Laksmi, dkk. 2008. Manajemen Perkantoran Modern. Jakarta: Penaku.
- Lingkungan Hidup. Journal of Education on Social Science, Volume 3 Number 2 October 2019, pp. 213-221
- LKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022
- Manik. 2003. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Djambatan
- Miles, B. Mathew & Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UIP.
- Moekijat. 2000. Kamus Manajemen, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Moleong, Lexy. 2005. Metode Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Nawaristika, C. (2012). Makna Leksikal dan Kontektual.
- Nawawi, Zaidan .2013. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Patoni,Ahmad, dkk, (2012), Dinamika Pendidikan Anak. Jakarta: PT. Bina Ilmu
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M2013 tentang penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis.
- Ramadhan, Dilva. 2019. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3r Tahun 2017. JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli -Desember 2019.
- Santoso, Muhammad. 2011. Peran Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Kebersihan Di Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kasus Di Kecamatan Tambaksari Surabaya). Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Vol.I No. 02, Tahun 2011.
- Saputri, Adnan, Alhadi. 2019. Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas
- Sobri, dkk. 2009. Pengelolaan. Yogyakarta: Multi Pressindo.

- Soekanto, Soerjono., *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru: Rajawali Pers.Jakarta: 2009
- Suandi, I Wayan. 2010. Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali*. Vol.I No. 01, Tahun 2010.
- Suardeyasari. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sugiyono. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sukandarrumidi. 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman. Offset YPAPI.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen* cetakan 10. Jakarta: PT. Bumi. Aksara.
- Tri Kharisma Jati, Peran Pemerintah Boyolali dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Permukiman Bumi Singkil Permai), *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Volume 1 Nomor 1, April 2013, 1-16.
- Tri Kharisma Jati, Peran Pemerintah Boyolali dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Permukiman Bumi Singkil Permai), *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Volume 1 Nomor 1, April 2013, 1-16.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med. Press.
- Yin, Robert K. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Raja Grafindo Persada: Depok.